

e-news letter

DES III 2019

**PKS** PARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



KH. Toriq Hidayat, Lc

# INDONESIA HARUS KRITIS TERHADAP PERMASALAHAN UIGHUR



# Indonesia Harus Kritis Terhadap Permasalahan UIGHUR

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari warga dunia untuk memastikan keselamatan dan hak asasi saudara-saudara kita muslim Uighur,

**H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A**

Pemerintah Indonesia harus protes dan tegas ke pemerintah Cina dan India, kalau perlu usir Kedubes dua negara itu

**H. Sukamta, Ph.D**

“Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Kami percaya bangsa China menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian. Salah satu ajaran Konfusian adalah ‘REN’, yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur

**Dr. H. Mardani, M.Eng**

Pemerintah mesti cermat dan akurat dalam mengambil sikap dalam kasus Uighur. Tidak perlu takut dengan kekuatan-kekuatan ekonomi China

**KH Toriq Hidayat, Lc**

Penindasan terhadap kelompok Muslim Uighur sangat mencederai rasa kemanusiaan dan oleh sebab itu harus segera dihentikan





Over the Uighur Repression

# PKS Faction in the House of Legislative Asks the Indonesian Government to Put Pressure on China

In the name of humanity, we should be more active and participative in the world's peace and order. Indonesia always has good relations with China, so that it could be leverage to urge the Chinese government

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Chairman of the PKS faction in the House of Legislative

Jakarta (20/12) – The chairman of the PKS faction in the House of Legislative, Jazuli Juwaini stated his concern regarding numerous reports regarding China's repression, persecution and discrimination of Uighur in Xinjiang. It is suspected that around a million people are currently detained in concentration camps in China.

Jazuli is also concerned about religious freedom in Uighur. His view is based on a credible report by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination and other international human rights organization, including by Muhammadiyah that recently visited Xinjiang.

"We send our deepest sympathy to our Muslim brothers and sisters in Uighur. For that, we ask the Chinese government to take our concern more seriously, with compliance with international human rights standards. Stop repression, persecution and discrimination" says Jazuli.

We respect China's sovereignty, but at the same time, we should react if there is a tragedy and human rights violation, as a form of responsibility as a human being. For this reason, PKS Faction asks the Indonesian government to be more proactive in this handling this problem, just like it is in the Palestinian and Rohingya issues.

"In the name of humanity, we should be more active and participative in the world's peace and order. Indonesia always has good relations with China, so that it could be leverage to urge the Chinese government" says Jazuli.

As a member of Commission 1 in the Indonesian House of Legislative, he also asks for more concrete action by the Indonesian government, whether through bilateral diplomacy or to use its bargaining position in the economy, diplomacy, trade or investment. Indonesia could



also use its strategic position as a non-permanent member of UN Security Council.

The point is we want the government to push the Chinese government to stop the discrimination and repression towards the Uighur, through any

means possible.

"This is our responsibility as a world citizen to ensure the safety and human rights for the people in Uighur" ends Jazuli.

# DPR: Indonesia Harus Kritis terhadap Permasalahan Muslim Uighur

PBB harus bersikap konsisten sejalan dengan pernyataan bersama Dewan HAM PBB yang mengecam aksi represif Tiongkok di bagian barat Xinjiang, bulan Juli 2019 lalu. PBB perlu mengambil tindakan konkret dalam menindaklanjuti komitmen tersebut

## **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (17/12) – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Toriq Hidayat, menyatakan bahwa Umat Islam di Indonesia harus kritis menyikapi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selama ini dihadapi komunitas Muslim di Uighur, Tiongkok.

Thoriq juga menepis kabar yang menyebutkan bahwa sejumlah ormas Islam di Indonesia mendapat suap dari pemerintah Tiongkok untuk diam terhadap pelanggaran HAM di negara tersebut.

"Komitmen Umat Islam dalam membela komunitas Muslim Uighur sangatlah kuat," ujar Toriq Hidayat melalui

keterangan tertulisnya, Senin (16/12).

Pemerintah Tiongkok, lanjut Toriq, harus segera menghentikan kekerasan dan persekusi terhadap kelompok Muslim Uighur.

"Penindasan terhadap kelompok Muslim Uighur sangat mencederai rasa kemanusiaan dan oleh sebab itu harus segera dihentikan," ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 11 ini.

Toriq juga menyerukan Pemerintah Tiongkok untuk membuka akses terhadap tim investigasi PBB untuk segera menuju kamp-kamp detensi di Xinjiang, yang telah menahan

jutaan komunitas Muslim Uighur di Tiongkok.

Menurutnya, PBB harus bersikap konsisten sejalan dengan pernyataan bersama Dewan HAM PBB yang mengecam aksi represif Tiongkok di bagian barat Xinjiang, bulan Juli 2019 lalu.

"PBB perlu mengambil tindakan konkret dalam menindaklanjuti komitmen tersebut," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, terdapat laporan dari Wall Street Journal yang memberitakan bahwa pemerintah Tiongkok menyuap sejumlah organisasi keagamaan di Indonesia agar diam terkait persekusi kelompok Uighur di Tiongkok. Muhammadiyah telah menyanggah tudingan dari media asing tersebut.



# Pemerintah Diminta Bersikap Soal Pelanggaran HAM Yang Dialami Etnis Uighur

Pemerintah harus satu suara, satu frekuensi. Karena pada prinsipnya pemerintah itu mendengarkan rakyatnya. Kalo dia nggak mendengarkan rakyatnya kita hukum pada pemilu berikutnya,

## **Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, diminta menyatakan sikap soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China.

Begitu disampaikan Papang Hidayat dari Amnesty Internationa dalam diskusi publik bertajuk "Mengungkap Pelanggaran HAM Terhadap Uighur" di Ibis Hotel, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).

"Karena persoalan hak asasi manusia (HAM) tidak bisa dikotak-kotakkan oleh batas negara," kata Papang.

Menurut dia, selain Kemlu RI, ormas hingga publik figur dan masyarakat biasa pun tetap harus menyuarakan pelanggaran HAM yang menimpa etnis muslim Uighur.

"Harus ada aliansi untuk mengangkat isu Uighur ini," ujar Papang.

Hal senada disampaikan anggota BKSAP DPR-RI Mardani Ali Sera. Menurutnya, perlu ada kesamaan persepsi antara pemerintah dengan parlemen, ormas, dan masyarakat sipil lainnya dalam menyatakan sikap soal penindasan muslim Uighur di China.

"Pemerintah harus satu suara, satu frekuensi. Karena

pada prinsipnya pemerintah itu mendengarkan rakyatnya. Kalo dia nggak mendengarkan rakyatnya kita hukum pada pemilu berikutnya," kata Mardani.

Lebih lanjut, politikus PKS ini mengakui bahwa pemerintah mesti cermat dan akurat dalam mengambil sikap dalam kasus Uighur.

"Tidak perlu takut dengan kekuatan-kekuatan ekonomi China," demikian Mardani.

Selain Papang dan Mardani Ali, narasumber yang hadir dalam diskusi kali ini adalah SVP Global Humanity & Philantropy ACT-GIP Syuhelmaidi Syukur dan Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi.

Foto :  
dpr.go.id



# Soal Uighur, Politisi PKS Asal Riau Ini Desak Jokowi Usir Dubes China

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Amanah dari UUD 1945 sudah jelas menyatakan, Indonesia menolak penjajahan dan penindasan kepada siapapun, apalagi terhadap satu etnis dan agama,"

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau

PEKANBARU - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma'azat, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengusir perwakilan negara China di Indonesia.

Syahrul mendasari desakan untuk mengusir perwakilan China dari Indonesia karena negara mereka sudah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berupa genosida (pembantaian etnis tertentu secara massif dan sistematis terhadap etnis tertentu).

"Pemerintah Indonesia harus protes dan tegas ke

pemerintah Cina dan India, kalau perlu usir Kedubes dua negara itu," ungkap Syahrul Aidi Ma'azat, kepada [riauonline.co.id](http://riauonline.co.id), Selasa, 17 Desember 2019.

Tidak hanya untuk perwakilan negara China saja telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur, Pemerintah dipimpin Presiden Jokowi juga lakukan hal serupa untuk Myanmar terhadap apa mereka lakukan ke Muslim Rohingya.

"Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Amanah dari UUD 1945 sudah jelas

menyatakan, Indonesia menolak penjajahan dan penindasan kepada siapapun, apalagi terhadap satu etnis dan agama," jelasnya.

Indonesia, tuturnya, bisa bersikap tegas terhadap negara melakukan genosida sebagai bentuk usaha aktif dalam perdamaian dunia.

"Bahkan kepedulian terhadap mereka, tidak harus menjadi muslim, akan tetapi atas dasar kemanusiaan," jelas kakak kelas Ustadz Abdul Somad (UAS) ini.



Indonesia bisa menawarkan diri untuk menjadi solusi bagi negara yang tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol PBB Mengenai Status Pengungsi dengan membuat regulasi lokal sehingga upaya pemenuhan hak-hak mendasar bagi pengungsi yang paling rentan

## Forum Pengungsi Global

# DPR: Semoga Jadi Solusi Atasi Pengungsi Dunia

**Dr. ABDUL KHARIS A,  
SE. M.Si.Akt**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (18/12) — Selama tiga hari dimulai tanggal 17 hingga 18 Desember 2019 di Jenewa Swiss diadakan Global Refugee Forum atau Forum Pengungsi Global pertama kali di dunia.

Diperkirakan Forum itu dihadiri lebih dari 2.000 perwakilan pemerintahan, PBB, perwakilan masyarakat madani dan badan-badan kemanusiaan serta para pemimpin bisnis.

Dalam hal ini, Indonesia juga mengirimkan delegasinya salah satunya dari lembaga parlemen DPR RI yang juga

turut hadir dengan perwakilan sejumlah Anggotanya.

Menurut Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang hadir dalam forum tersebut, Forum Pengungsi Global ini bertujuan untuk menentukan pendekatan baru dan menyepakati komitmen jangka panjang untuk membantu para pengungsi dan komunitas yang menampung mereka.

"Lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi akibat perang, konflik dan persekusi. Di antara mereka adalah lebih dari 25 juta pengungsi yang melewati perbatasan internasional dan tidak bisa pulang, ini jelas masalah kita bersama, masalah dunia, masalah kemanusiaan Global yang harus kita cari solusinya bersama bukan hanya satu atau sejumlah negara saja," Ujar Kharis, Anggota DPR RI Fraksi PKS ini dalam keterangan tertulisnya kepada Media hari Rabu 18 Desember 2019.

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) kepada sejumlah media mengatakan lebih dua pertiga pengungsi di seluruh

dunia berasal dari hanya lima negara: Suriah (6,7 juta), Afghanistan (2,7 juta), Sudan Selatan (2,3 juta), Myanmar (1,1 juta), dan Somalia (0,9 juta).

UNHCR mengatakan data terkini menunjukkan Turki merupakan negara yang menampung jumlah pengungsi terbanyak, yaitu 3,7 juta, kebanyakan dari Suriah.

Selain pengungsi besar yang berada dinegara di atas, terjadi sebuah tren gelombang pengungsi global yang mengalir ke Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Mereka berpindah karena dipicu oleh perang, konflik dan persekusi menahun di negara asalnya.

Menyikapi situasi itu, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Secara garis besar, Perpres 125 mengatur bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pengungsi di areanya dan berkoordinasi dengan UNHCR untuk



menemukan masalah dan mencari solusi bagi pengungsi.

"Saya kira dari hal menangani pengungsi, Indonesia bisa menawarkan diri untuk menjadi solusi bagi negara yang tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol PBB Mengenai Status Pengungsi dengan membuat regulasi lokal

sehingga upaya pemenuhan hak-hak mendasar bagi pengungsi yang paling rentan, seperti fasilitas penampungan sementara dan akses pada layanan kesehatan dapat diberikan" tutup Kharis.

# STOP India's Discriminatory Law!

As stated in the Preamble to the 1945 Constitution, our nation was born on the declaration against colonialism over the world. Indonesia must actively involve in preserving world order. Thus, human rights violations in the form of ratification of the discriminatory bill by the Indian government must be a concern of the Indonesian government

## H. SUKAMTA, Ph.D

Member of the House of Representatives  
Commission I

Jakarta (12/15) — Member of the House of Representatives Commission I, Sukamta, condemned the passage of India's discriminatory Citizenship Amendment Bill (CAB) into law on Friday 13 December 2019.

This new bill, according to Sukamta, is considered discriminatory because it only applies to immigrants from Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan who are Hindus, Sikhs, Christians, Jains, Parsis, and Buddhists. Islam is not mentioned in the bill, thus threatening the existence of

Muslim immigrants.

"As stated in the Preamble to the 1945 Constitution, our nation was born on the declaration against colonialism over the world. Indonesia must actively involve in preserving world order. Thus, human rights violations in the form of ratification of the discriminatory bill by the Indian government must be a concern of the Indonesian government " explained Sukamta.

Therefore, according to the Deputy Chairman of the PKS Faction in Law and Security, the government must immediately clarify the Indian government about the discriminatory bill.

Furthermore, Sukamta also urged the government to

protest against India over the bill because besides violating human rights the bill could potentially lead to prolonged conflict.

"This issue is very sensitive, it will definitely trigger reactions in various parts of the world. Horizontal conflict can spread to other countries. India should understand the bad consequences that will come from this discriminatory bill," said Sukamta.

More concretely, Sukamta asked the Indonesian government to immediately urge the Government of India through its embassy to revoke the bill to protect Muslims from the threat of annihilation.

"I ask the Government through the Ministry of Foreign Affairs to immediately summon the Indian Ambassador to convey Indonesia's objections to this discriminatory bill and to urge its revocation. This is the embodiment of a free and active foreign policy," concluded the Indonesian parliamentarian from Yogyakarta.

Photo : dpr.go.id



## Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino

# PKS: PPAK Segera Laporkan KPK dan Kepolisian

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari polemik yang terjadi di masyarakat, PPAK jangan hanya sebatas menyampaikan informasi sepotong-potong yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat

**Dr. KH. SURAHMAN  
HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (17/12) — Penemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening sejumlah kepala daerah di kasino luar negeri, perlu segera ditindaklanjuti.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi II, Surahman Hidayat menyatakan PPAK harus

segera melaporkan kepada KPK dan Kepolisian, apalagi rekening tersebut dicurigai merupakan upaya pencucian uang.

"Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari polemik yang terjadi dimasyarakat, PPAK jangan hanya sebatas menyampaikan informasi sepotong-potong yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat," ujar Surahman.

Temuan ini lanjut Surahman, perlu ditindaklanjuti secara konkret, ini bisa dijadikan momentum dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih.

Surahman Hidayat juga mengkritisi langkah PPAK yang hanya menginformasikan adanya kepala daerah yang memiliki rekening kasino diluar negeri tanpa melakukan tindakan konkret lanjutan, apa yang dilakukan PPAK jangan sampai hanya merusak nama baik kepala daerah.

"Langkah mengungkap rekening kasino kepala daerah harus didukung, karena tidak menyalahi ketentuan perundangan-undangan. Namun, jangan berhenti tanpa

ada tindakan konkret, kita perlu memastikan kepala daerah tidak melakukan tindakan korupsi dan perbuatan tercela lainnya," tegas Surahman.

Lebih lanjut Surahman Hidayat mengatakan agar PPAK tidak takut untuk mengungkap kasus ini, buka nama-nama kepala daerah yang memiliki rekening kasino ke publik, dan laporkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan.

"Ada unsur perjudian dan kemungkinan unsur pencucian uang disana. Surahman juga menilai pendapat yang mendiskreditkan PPAK dikarenakan mengungkap kasus ini ke publik kurang bijak, masyarakat perlu tahu kelakuan pemimpinnya," papar Surahman.

Surahman juga mendukung langkah PPAK membuka masalah ini ke khalayak umum, tapi jangan berhenti disini, segera tindak lanjuti dengan melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum karena ada unsur perjudian dan kemungkinan TPPU", tutup Surahman.

Foto : dpr.go.id



# Habib Aboebakar Soroti Peredaran Narkoba di Lapas Jatim

Ini bagaimana bisa? Aneh kan para napi dalam lapas bisa order? Bagaimana pengamanan di dalam? Bagaimana mungkin orang dalam lapas bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tentunya itu semua harus jadi bahan evaluasi untuk kanton wilayah Kemenkumham Jatim

**Habib ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E**

Anggota Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI meakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur (Jatim), guna melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya, seperti dengan Polda, Kajati, Kanwil Kemenkumham, Ketua Pengadilan Tinggi, hingga BNN Propinsi Jatim.

"Komisi III ke Jatim ini adalah bagian dari kunjungan kerja komisi untuk reses. Pada pokoknya adalah bagian dari kegiatan pengawasan mitra kerja Komisi III di Jatim," kata Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alabsyi dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Jumat (20/12/2019).

Dijelaskan Habib

Aboebakar sapaan politisi dari Fraksi PKS DPR itu, salah satu hal yang disoroti komisinya adalah tingginya peredaran narkoba di daerah Tapal Kuda itu itu.

"Saya mendapat data, hingga bulan November saja sudah 53 gram lebih narkoba yang disita, padahal tahun kemarin hanya 26 gram artinya ini ada peningkatan," kaanya.

Hal ini, menurut Habib Aboebakar, tentunya harus mendapatkan perhatian Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim, ataupun Direktorat Narkoba

Polda Jatim. Dia juga meminta harus ada upaya peningkatan pemberantasan narkoba.

"Selain itu, kita juga mengingatkan Kanwil Kemenkumham Jatim, agar meningkatkan tata kelola lapas (lembaga pemasyarakatan) Utamanya untuk pengamanan lapas dan pencegahan masuknya narkoba ke lapas. Saya mendapat info bahwa sebagian besar narkoba itu pesanan dari lapas," bebarnya.

Tentunya ini, lanjut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, menimbulkan tanya bagaimana para warga binaan dalam lapas itu bisa mengorder barang haram.

"Ini bagaimana bisa? Aneh kan para napi dalam lapas bisa order? Bagaimana pengamanan di dalam? Bagaimana mungkin orang dalam lapas bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tentunya itu semua harus jadi bahan evaluasi untuk kanton wilayah Kemenkumham Jatim," sebut Habib Aboebakar.

Selain itu, dirinya juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Jatim. Sebab dirinya melihat Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur, belum maksimal



dalam mengusut kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya.

"Juga perkara rasuah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Dua kasus ini sepertinya berjalan lambat, saya minta dua hal ini jadinatensi Kajati yang baru," tegasnya.

Di sisi lain, Habib Aboebakar mengingatkan bahwa masih banyaknya tunggakan kasus korupsi yang

menjadi PR (pekerjaan rumah) Polda Jatim. Apalagi, ia mendapat info ada 40 perkara yang masih ditangani di akhir tahun.

"Tentunya ini perlu kerja keras untuk menanganinya. Saya juga mengapresiasi Polda telah menyelesaikan 41 perkara yang lain, sehingga masih menyisakan 40 perkara tipikor teraebut," pungkas Habib Aboebakar

Foto : dpr.go.id

Di tangan petani milenial, dimana pendidikan dan kemampuan nalar mereka yang lebih tinggi, inovasi teknologi tersebut diharapkan mampu disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Ini berarti tercipta inovasi baru oleh generasi milenial

**Dr. HERMANTO,  
SE, MM.**

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (20/12) — Anggota DPR RI dari Sumatera Barat Hermanto mendukung Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai penyelenggara bersama Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNAN) XVI.

Dengan demikian, masyarakat terutama generasi muda tani di kedua daerah tersebut akan banyak yang bisa menyaksikan dari dekat modernisasi pertanian terutama produk-produk inovatifnya.

# Hermanto Dukung Padang dan Padang Pariaman Sebagai Lokasi Penas XVI

"Dengan melihat sendiri modernisasi alat-alat pertanian diharapkan generasi muda Padang dan Padang Pariaman khususnya serta Indonesia pada umumnya akan tertarik untuk menekuni sektor pertanian. Semoga tertangkap di benak mereka, bekerja sebagai petani milenial tidak kalah bergengsi dengan profesi lainnya", papar Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (20/12).

Penas XVI direncanakan berlangsung tanggal 20-25 Juni 2020. Kegiatan Penas merupakan kegiatan rutin setiap tiga tahun sekali. Digagas oleh para tokoh tani dan nelayan sejak tahun 1971.

"Kegiatan Penas diharapkan bisa menjadi wadah pertemuan para tani, nelayan dan petani hutan untuk saling mengisi dan memperkuat kepemimpinan agribisnis sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan", ujar Hermanto.

Hermanto berharap di Penas kali ini bisa diperagakan pertanian digital dimana alat dan mesin pertanian bisa

beroperasi sendiri sebagaimana yang sudah dilakukan oleh petani di luar negeri.

"Diharapkan ada peragaan pemanfaatan drone untuk proses pemupukan dan juga penggunaan traktor yang dikendalikan oleh remote control", ungkap legislator dari FPKS DPR ini.

Pada kegiatan Penas kali ini, lanjut Hermanto, diharapkan menjadi forum transfer berbagai inovasi teknologi yang efektif terutama kepada petani generasi milenial.

"Di tangan petani milenial, dimana pendidikan dan kemampuan nalar mereka yang lebih tinggi, inovasi teknologi tersebut diharapkan mampu disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Ini berarti tercipta inovasi baru oleh generasi milenial", tuturnya.

Kedepan, Hermanto berharap para petani maju ini bisa menjadi penyuluh-penyuluh swadaya terutama di daerahnya masing-masing sehingga terjadi percepatan pembangunan pertanian di Indonesia.

Untuk kesuksesan



penyelenggaraan Penas nanti, Hermanto meminta para pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, KTNAN Pusat, KTNAN Sumbar serta KTNAN Daerah Padang dan Padang Pariaman untuk saling proaktif berkoordinasi dalam rangka menyamakan langkah dan strategi agar maksud dan

tujuan dilaksanakannya Penas bisa terlaksana.

"Koordinasi para pihak sangat penting agar kegiatan Penas nantinya bisa berjalan efektif dan sukses", pungkas legislator dapil Sumbar 1 ini.

Foto : dpr.go.id

# Jalan Tol Layang Harus Urai Kemacetan

“Intinya, berapa pun batas kecepatan maksimal yang ditetapkan agar para pemangku kepentingan tidak membingungkan masyarakat. Harus berpegang pada aturan yang berlaku dengan prinsip cepat tapi aman”

**Ir. H. SIGIT  
SOSIANTOMO**

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (16/12) — Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek telah diresmikan oleh Pemerintah beberapa hari yang lalu. Di sisi ini, pengoperasian tol layang ini dapat mengurangi kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek, yang tepat berada di bawah tol layang. Di sisi lain, perlu diwaspadai potensi kecelakaan

di jalan tol yang kemungkinan meningkat. Pengguna jalan tol cenderung melaju dengan kecepatan tinggi.

Perlu diketahui bahwa Jalan tol layang ini membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat (KM 9+500 sampai dengan KM 47+500). Jalan tol ini merupakan yang pertama di Indonesia dalam satu ruas ada layanan tol (elevated dan at grade). Infrastruktur yang dibangun sejak tahun 2017 ini mulai bisa dinikmati oleh pengguna secara umum mulai Ahad, (15/12/2019).

Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo mengapresiasi mitra kerja khususnya Kementerian PUPR. Sangat diharapkan pengoperasian jalan tol tersebut bisa menghilangkan momok kemacetan yang selama ini ditemui pengguna jalan tol di koridor Jakarta – Cikampek.

“Mungkin akan menghilangkan penderitaan selama lima tahun kita lewat jalan tol Jakarta-Cikampek. Dulu pernah kita punya horor lewat situ delapan jam, lalu turun jadi empat jam, lalu turun lagi satu setengah jam”, kata Sigit.

Terkait batas kecepatan

yang simpang siur, diingatkan kepada pemangku kepentingan agar satu suara dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Sebelumnya sempat beredar infografis di media sosial bahwa kecepatan maksimal adalah 60 kilometer per jam. Namun ada lagi yang mengatakan 70 kilometer per jam adalah kecepatan yang aman. Terakhir Kementerian PUPR menyampaikan batas kecepatan maksimal 80 kilometer per jam.

“Kita kembalikan saja kepada aturan yang berlaku. PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 ayat 2 jelas bahwa Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam”, terang Sigit.

Penetapan kecepatan rencana pasti sudah ada pada saat tahap perencanaan atau perancangan. Kecepatan rencana yang diambil berhubungan dengan kondisi medan jalan dan kriteria jalan

apakah termasuk jalan perkotaan ataukah jalan antarkota. Pada Standar Geometri Jalan Bebas Hambatan Untuk Jalan Tol didapati jalan perkotaan dengan kondisi medan jalan datar kecepatan rencana 80-100 kilometer per jam. Sedangkan pada jalan antarkota dengan kondisi medan datar kecepatan rencananya 120 kilometer per jam.

“Intinya, berapa pun batas kecepatan maksimal yang ditetapkan agar para pemangku kepentingan tidak membingungkan masyarakat. Harus berpegang pada aturan

yang berlaku dengan prinsip cepat tapi aman”, pungkasnya.





# DPR Minta Erick Benahi BUMN Galangan Kapal



“Jika tidak punya kapabilitas, seharusnya mereka dicopot dan diganti oleh orang yang punya kapabilitas di bidang perkapalan,

## RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (21/12) — Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menetapkan target waktu penyelesaian

penataan dan penyehatan perusahaan milik negara.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rafli mengusulkan paling lambat satu tahun sejak dilantik proses beres seluruh BUMN dan anak BUMN bisa tuntas.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi PKS dari Aceh itu meminta Erick menjadikan BUMN yang kondisinya “sakit” parah sebagai prioritas utama penataan dan penyehatan.

Rafli menyontohkan BUMN Perkapalan. Penyehatan BUMN perkapalan penting sebagai penopang utama kebangkitan industri perkapalan nasional yang sangat penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah sektor yang menjadi sumber penting pendapatan negara seperti industri pariwisata bahari, perikanan, dan industri maritim lainnya sangat membutuhkan dukungan industri galangan kapal nasional. Tidak kalah pentingnya perdagangan antar pulau hanya mungkin berkembang dengan dukungan industri perkapalan nasional yang kuat.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mempunyai BUMN yang kuat di bidang galangan kapal agar perekonomian dalam negeri bisa berlari,” tegas Rafli.

Terlebih Presiden Jokowi yg sendiri telah mencanangkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, antara lain dengan program tol laut.

Program tersebut penting untuk menyambungkan antar kepulauan dengan memperbaiki lalu lintas kapal. Konektivitas antar pulau berperan dalam mengatasi ketimpangan harga bahan barang pokok maupun kebutuhan lainnya di pelbagai daerah.

Menurut Rafli, salah satu BUMN yang mendesak dibenahi adalah PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) yang

kondisinya dalam beberapa tahun terakhir kian memprihatinkan.

Rafli pun mengaku sudah mengantongi laporan bahwa PT DKB tak menyelesaikan proyek kapal perintis untuk program tol laut yang dipesan oleh Kementerian Perhubungan pada 2015 lalu. Proyek itu berupa 4 unit, 2 unit kapal perintis 2.000 GRT dikerjakan langsung oleh PT. DKB; 1 unit kapal perintis 2.000 GRT yang dikerjasamakan dengan perusahaan swasta; PT. Karakatau Shipyard; dan 1 unit 750 GRT juga dikerjakan langsung oleh PT. DKB.

“Kalau selaras dengan pemerintah, kenapa BUMN ini malah memperlambat pengerjaannya?” beber Rafli.

Proyek lain yang juga bermasalah adalah proyek nasional alutista TNI milik Kemenhan, yaitu kapal angkut tank (AT-1) dengan nilai sebesar Rp 159,5 miliar dan pekerjaan kapal angkut tank (AT-2) senilai Rp 159,5 miliar.

Padahal PT DKB sudah mendapat tambahan modal lewat Penyerahan Modal Negara (PMN) seperti pernah disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu waktu lalu. Ketika itu, Sri Mulyani menyebut ada 7 BUMN yang kinerja keuangannya tetap merugi pada tahun 2018 meskipun pemerintah telah menyuntikkan PMN Rp 3,6 triliun. Salah satu BUMN yang

disebut oleh Sri Mulyani adalah PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari.

Sementara itu, berdasarkan keterangan mantan Komisaris PT DKB, Desi Albert Mamahit, PMN itu dipakai tak sesuai peruntukan, karena digunakan untuk membayar operasional dan gaji karyawan.

Rafli pun menyoroti kinerja jajaran direksi PT DKB selama memimpin perusahaan. Sebab, menurut dia, perusahaan yang bisa mendapatkan rapor hijau harus dipimpin oleh pemimpin yang kompeten dan mengetahui seluk beluk usaha di bidang galangan kapal.

“Jika tidak punya kapabilitas, seharusnya mereka dicopot dan diganti oleh orang yang punya kapabilitas di bidang perkapalan,” tegasnya.

Rafli pun berencana menanyakan hal itu kepada Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja dengan Komisi VI, Januari 2020 mendatang.

Pergantian direksi yang tidak punya kapabilitas maupun integritas, merupakan langkah awal bebahan BUMN agar kinerja perseroan melesat dan tidak merugikan negara. Apalagi, tahun depan diprediksi akan memasuki masa resesi global.

“Saya mendukung langkah Pak Erick untuk segera memulihkan kesehatan perusahaan,” pungkasnya.

Foto : dpr.go.id



“Ini bagian dari operasi bersih-bersih BUMN. Dari hasil audit investigasi ini kita bisa mengetahui kerugian yang benar-benar disebabkan oleh tindakan manajemen yang salah dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan curang (fraud),”

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (16/12) — Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadikan kasus Jiwasraya sebagai momentum melakukan audit investigasi seluruh BUMN yang merugi.

Menurut Amin audit investigasi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi secara detail penyebab kerugian yang terjadi pada masing-masing BUMN.

“Ini bagian dari operasi bersih-bersih BUMN. Dari hasil audit investigasi ini kita bisa mengetahui kerugian yang benar-benar disebabkan oleh

# Kasus Jiwasraya Harus Jadi Triger Audit Investigasi BUMN Rugi

tindakan manajemen yang salah dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan curang (fraud),” tegas Amin.

Dua jenis kerugian tersebut kata Amin, perlu penanganan yang berbeda. Kerugian yang disebabkan oleh tindakan manajemen yang salah (tidak profesional), Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham perlu mengganti atau melakukan pembinaan terkait sikap profesionalisme mereka.

Sedangkan terhadap kerugian yang disebabkan oleh perilaku curang, Kementerian BUMN harus memproses para pelaku sesuai aturan yang berlaku. Ini masuk ranah pidana.

Menurut Anggota Fraksi PKS dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu, langkah penyuntikan modal dari pemerintah pada sejumlah BUMN yang merugi bisa menjadi pilihan yang tidak tepat. Dengan kesulitan likuiditas dan utang jatuh tempo, sejumlah BUMN tersebut sangat mungkin menggunakan dana segar suntikan pemerintah tersebut untuk membayar utang atau

keperluan lain yang tidak sesuai peruntukannya. Ujung-ujungnya, modal tersebut habis dan BUMN tersebut tetap menderita rugi.

Mega Skandal Jiwasraya Dalam kasus yang menimpa Jiwasraya, Amin melihat hal itu sebagai megaskandal yang mencoreng wajah asuransi jiwa di Indonesia dan menjadi perhatian internasional.

“Kami, Komisi VI, meminta Kementerian BUMN untuk membuka hasil audit investigasi Jiwasraya yang konon sudah dilakukan di era Menteri Rini Sumarno,” tegas Amin.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapaksi) VI dari PKS itu juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Dengan langkah itu diharapkan perusahaan asuransi pelat merah yang tengah berstatus gagal bayar tersebut cepat membayar kerugian nasabah.

Jiwasraya tercatat mengalami ekuitas minus Rp 24 triliun per September 2019. Angka tersebut berasal dari jumlah aset per kuartal III/2019 Rp 25,6 triliun, sedangkan utangnya mencapai Rp 49,6

triliun. Jiwasraya membutuhkan sedikitnya dana Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (RBC) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yakni 120%.

Selain itu, kerugian Jiwasraya per September 2019 mencapai angka Rp 13,74 triliun. Sedangkan, perusahaan BUMN ini juga memiliki total kewajiban klaim asuransi sebesar Rp 16,3 triliun.

“Kasus Jiwasraya baik dari sisi hukum, keuangan maupun restrukturisasi perusahaan harus segera diselesaikan. Apalagi kasus ini bukan saja berskala nasional tapi menjadi perhatian dunia internasional karena merugikan tidak kurang dari 500 warga asing yang berasal dari beberapa negara,” tutup Amin.



Yang kita butuhkan sekarang ini bukan curhat presiden tapi kerja nyata. Buktikan bahwa presiden sungguh-sungguh ingin membangun kilang minyak sebagai salah satu upaya memperbaiki defisit neraca perdagangan

**Dr. H. MULYANTO,  
M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (21/12) — Kejangkalan Presiden atas tidak adanya pembangunan kilang minyak sejak beberapa tahun seharusnya diikuti dengan mengeluarkan kebijakan berupa instruksi presiden (inpres) kepada lembaga terkait.

Sebagai pemimpin tertinggi presiden punya kewenangan dan otoritas yang dilindungi konstitusi untuk memaksa lembaga-lembaga yang dipimpinnya mengerjakan apa yang dianggapnya perlu. Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, Jumat (20/12) di Jakarta.

Menurut Mulyanto,

# Presiden Jokowi Harus Kawal Pembangunan Kilang Minyak di Indonesia

kejangkalan presiden di forum seminar tidak akan berarti apa-apa tanpa diikuti kebijakan yang tegas. Jika kebiasaan ini terus dilakukan bukan tidak mungkin kewibawaan presiden di mata rakyat akan turun.

"Yang kita butuhkan sekarang ini bukan curhat presiden tapi kerja nyata. Buktikan bahwa presiden sungguh-sungguh ingin membangun kilang minyak sebagai salah satu upaya memperbaiki defisit neraca perdagangan", ungkapnya.

Bila perlu, Mulyanto menambahkan, Presiden pimpin langsung program pembangunan kilang minyak ini sampai benar-benar terwujud.

"Jangan seperti periode sebelumnya presiden luput merealisasikan pembangunan kilang minyak karena terlena dengan janji-janji bawahannya," ujar Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menilai pembangunan kilang minyak baru ini mendesak dilakukan untuk mengurangi impor migas yang selama ini menjadi salah satu penyebab

terbesar defisit neraca perdagangan.

"Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas untuk mengurangi impor migas sambil menambah jumlah kilang yang mampu mengolah minyak mentah (crude oil) menjadi BBM dan produk lainnya", tutur Mulyanto.

Menurutnya, pembangunan kilang ini dapat membantu Pemerintah menekan impor minyak jadi.

"Meskipun tidak dipungkiri dengan pembangunan kilang minyak ini Pemerintah masih perlu impor minyak mentah. Tapi setidaknya angka yang harus ditanggung tidak sebesar bila pemerintah impor migas siap pakai", pungkasnya.

Mulyanto menilai Pemerintah cukup mampu membangun kilang migas. Apalagi sebelumnya Pertamina sudah menyatakan siap dan berencana membangun kilang migas ini di beberapa titik. Dengan demikian presiden cukup mem-back up kebijakan agar program ini dapat terealisasi.



"Jika presiden merasa ada pihak tertentu yang sengaja menghalang-halangi upaya pembangunan kilang minyak ini justru dengan kewenangan yang dimiliki presiden dapat memerintahkan pihak keamanan untuk mengambil tindakan", kata Mulyanto. Mulyanto menegaskan Presiden jangan berpolemik di media dengan menyebut ada mafia migas yang tidak senang pemerintah membangun kilang minyak. Hal itu disebabkan oleh

terganggunya impor migas yang selama ini dinikmati.

"Presiden jangan kalah dengan mafia. Jika presiden tahu siapa-siapa saja yang menjadi penghalang, harus berani diambil tindakan," tegas Mulyanto.

Untuk mengoptimalkan manfaat, Mulyanto mengusulkan pembangunan kilang minyak ini diintegrasikan dengan industri petrokimia. Sehingga antar pihak bisa saling bersinergi

Seharusnya umat beragama tidak lagi hanya bicara basi-basi, tapi harus betul-betul menghadirkan komitmen beragama yang melahirirkan tanggung-jawab sosial dan tanggung-jawab terhadap hubungan antarpihak. Supaya umat beragama betul-betul menjadi bagian dari solusi untuk menuntaskan beragam masalah yang sedang terjadi

**Dr. H.M. HIDAYAT  
NUR WAHID, M.A.**

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (20/12) — Umat beragama di Myanmar, Cina, Palestina, dan India menjadi korban konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh umat beragama lain. Padahal seharusnya, sesama umat beragama menjadi solusi dari konflik, termasuk konflik yang sedang terjadi di Asia.

# HNW: Umat Beragama Harus Jadi Solusi Konflik

Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus Wakil Ketua MPR yang juga merupakan Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid atau akrab disapa HNW ini.

Menurut HNW, sebagai umat antar agama yang hidup berdampingan, selayaknya semua umat bisa hidup rukun dalam mewujudkan perdamaian dunia.

"Karena, konflik antar agama bukan bagian dari ajaran agama-agama," ujar Pria yang juga sebagai Penasihat King Abdul Aziz International Centre for Interfaith and Intercultural Dialogue (KAICIID), saat penyelenggaraan lokakarya internasional di Jakarta.

Melihat kondisi umat beragama di Asia hari ini, menurut Hidayat, seharusnya membuat semua umat beragama berpikir lebih keras. Peristiwa yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, etnis Uighur di Cina, umat Islam di India dan Palestina sangat memprihatinkan.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, menurut Hidayat, seharusnya umat beragama tidak lagi hanya bicara basi-

basi, tapi harus betul-betul menghadirkan komitmen beragama yang melahirkan tanggung-jawab sosial dan tanggung-jawab terhadap hubungan antarpihak.

"Supaya umat beragama betul-betul menjadi bagian dari solusi untuk menuntaskan beragam masalah yang sedang terjadi," ujar Wakil Ketua MPR RI itu saat mengikuti lokakarya bertema "Membina Dialog Antaragama dan Intra Agama untuk Mengurangi Konflik di Asia Selatan dan Tenggara".

Lokakarya itu diselenggarakan KAICIID dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dua lembaga tersebut bekerja sama dengan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Gusdurian Foundation.

Hidayat Nur Wahid menjelaskan, maksud dari kegiatan lokakarya adalah mendialogkan beragam kondisi keberagaman di Asia Selatan dan Tenggara. Seraya, mencari titik temu yang bisa menghadirkan beragama yang membawa harmoni dan kehidupan yang semakin damai dan toleran.

Harapannya, umat beragama memahami bahwa



beragama bukan untuk menghadirkan konflik, melainkan justru menjadi bagian dari solusi untuk masalah dan konflik.

Hidayat menambahkan, dialog ini menggunakan pendekatan organisasi sosial dan keagamaan. Sejumlah tokoh lintas agama hadir dalam forum ini.

"Adapun topik yang dibahas adalah relasi antara Islam dan Buddha. Meski

temanya Islam dan Buddha, tapi yang diundang beragam latar belakang agama," katanya.

Ia berharap, forum ini memberikan spektrum yang lebih luas untuk kedua agama, dan menjadi bagian yang terus mengokohkan kehidupan yang harmoni di Asia.

# Batal Naik, BPJS Tutup Defisit Anggaran dengan Surplus Peserta PBI

Cirebon (15/12) — Netty Prasetyani, anggota komisi IX DPR RI, terus berjuang mewujudkan pemenuhan hak dasar kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pra sejahtera.

"Pelayanan kesehatan adalah hak rakyat yang dijamin negara. BPJS Kesehatan diamanahkan untuk memastikan jaminan tersebut berjalan dengan baik," ungkapnya sesuai kegiatan Komunikasi Informasi (KIE) BPOM bersama tokoh masyarakat di Gedung PGRI, Kabupaten Cirebon (14/12)

Netty menyampaikan, dalam beberapa kali rapat maraton Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan, BPJS dan DJSN, iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJU) dan Bukan Pekerja (BP) tidak dinaikkan.

"Jadi iuran BPJS untuk kelas III tidak naik ya. Rapat terakhir, DPR menyetujui upaya Kemenkes dan BPJS untuk menutupi selisih iuran PBPJU dan BP kelas III dengan proyeksi surplus akibat kenaikan iuran peserta PBI yang dibayarkan

pemerintah," katanya.

Menurut data BPJS Kesehatan, peserta PBPJU dan BP Kelas III di Indonesia terdaftar sejumlah 19.962.569 jiwa.

"Mereka ini yang harusnya masuk dalam red zone kesejahteraan yang pasti kesulitan jika iurannya dinaikkan. Mereka harus dibantu mendapatkan pelayanan kesehatan, jika perlu dipindahkan menjadi peserta PBI," tambah Netty.

Ketika dikonfirmasi apakah pemerintah memiliki anggaran untuk membayar iuran sekitar 96 juta peserta PBI yang naik hampir 100 persen, Netty menjawab, "Itulah tugas Kemenkes dan BPJS untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan anggaran", ungkap Netty.

Menurut Netty, desain APBN Kemenkes masih bersifat teknokratis, tidak berorientasi pada kepentingan publik, serta tidak menjadi instrumen ideologis untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.

"Besarnya anggaran yang digelontorkan tidak sesuai

dengan konteks permasalahan yang sedang dihadapi," pungkasnya.

Netty mengkhawatirkan ketidakmampuan anggaran negara menjawab persoalan yang ada akan membuat masyarakat menempuh jalan irasional.

"Ketika ada anggota keluarga yang sakit, tidak bisa dibawa ke fasilitas kesehatan karena menunggang premi, tidak bisa mutasi ke PBI karena tidak mampu membayar tanggakan, mereka bisa saja berubah menjadi irasional dengan melakukan praktek memotong ayam hitam karena ingin sehat," urainya.

Dengan adanya kesepakatan BPJS Kesehatan selisih iuran PBPJU dan BP kelas III tersebut setidaknya bisa menjawab kegelisahan masyarakat akibat isu kenaikan iuran BPJS.

"Kita akan kawal agar BPJS konsisten dan serius mengimplementasikan upaya menutup defisit dan menyelesaikan persoalan lainnya," tutup Netty.



**Kita akan kawal agar BPJS konsisten dan serius mengimplementasikan upaya menutup defisit dan menyelesaikan persoalan lainnya**

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

# Sekolah Olahraga Harus Diberikan Payung Hukum

Meskipun akreditasi sekolah olahraga tersebut sudah berlabel 'A', namun harus ada kejelasan mengenai sistem pengukuran nilai sekolah tersebut. Sebab sekolah khusus ini berbeda sistem penilaian dan ukurannya dengan sekolah reguler yang ada. Menurutnya ukuran dari sekolah olahraga ini sebaiknya dilihat dari prestasi murid di dalamnya.

## Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menjelaskan, Kalimantan Timur memiliki signature bidang keolahragaan berupa sekolah khusus olahraga yang kondisinya sangat memadai serta telah menghasilkan atlet-atlet berbakat dan telah mengharumkan nama Kaltim bernama SKOI. Namun, hal tersebut ternyata belum didukung payung hukum yang jelas, sehingga ia berniat merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal tersebut ia sampaikan sesuai rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI

dengan Wali Kota Balikpapan, KONI Kaltim, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan SKOI, di Kantor Walikota Balikpapan, Kaltim, Jumat (13/12/2019). Menurutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Nadiem Makarim, dengan gagasannya berjanji akan meningkatkan kompetensi dasar, minat, dan bakat.

"Jadi sebenarnya kunjungan ini sebenarnya ada banyak hal yang selama ini belum kita dapatkan, justru bisa menjadi bahan untuk dibawa diperbaiki pada regulasinya. maka mestinya sih ini dilakukan

dengan cara bagaimana pengukurannya. Ini yang memang nanti perlu dibuatkan payung hukumnya berkaitan dengan hal ini," tutur legislator dapil Jawa Barat I itu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan bahwa meskipun akreditasi sekolah olahraga tersebut sudah berlabel 'A', namun harus ada kejelasan mengenai sistem pengukuran nilai sekolah tersebut. Sebab sekolah khusus ini berbeda sistem penilaian dan ukurannya dengan sekolah reguler yang ada. Menurutnya ukuran dari sekolah olahraga ini sebaiknya dilihat dari prestasi murid di dalamnya.

"Meskipun akreditasi sekolahnya sudah 'A', tetapi salah satu ukuran dari akreditasinya adalah berapa sih lulusannya yang masuk ke dalam perguruan tinggi. Ini kan sekolah olahraga, ukurannya harusnya justru yang berprestasi di tingkat nasional berapa atau yang kemudian masuk ke event internasional berapa, yang jadi atlet pro berapa kan mestinya begitu," tegasnya.

Selain itu, Ledia meminta agar penamaan sekolah khusus diganti sebab selama ini penamaan tersebut identik

kepada kategori sekolah disabilitas, juga untuk memudahkan sistem alokasi anggarannya. "Nah sistem keuangan, bantuan dari pusat ke sekolahnya juga tidak bisa sama dengan sekolah reguler. Nah itu berarti harus bicara dengan Kementerian Keuangan supaya aturan keuangannya lebih fleksibel untuk hal-hal seperti ini," tukasnya. (er/sf)

Foto : dpr.go.id



# Junaidi Auly Dorong BI Gencarkan Literasi Transaksi Non Tunai



Lampung (16/12) — Program yang dicanangkan Bank Indonesia (BI) yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan kegiatan elektronikasi pembayaran yang diharapkan mampu meminimalisir berbagai masalah saat melakukan pembayaran dengan tunai.

Junaidi Auly, selaku Anggota Komisi XI DPR RI mendorong kepada Bank

Indonesia (BI) untuk aktif dalam mendorong literasi transaksi non tunai.

"Dengan dilakukannya sosialisasi ini, harapannya literasi keuangan masyarakat terus meningkat dan bisa merasakan manfaatnya. Adapun salah satunya adalah efisiensi" ungkap Junaidi Auly dalam agenda Sosialisasi Elektronikasi Alat Pembayaran di Balai Desa Taman Asri,

Probolinggo, Lampung Timur. (Senin, 16/12/2019)

Junaidi menjelaskan, sederhananya elektronikasi merupakan upaya mengubah pembayaran tunai menjadi non tunai serta mengubah transaksi dari manual atau konvensional menjadi elektronik.

Hasil Survey Nasional Literasi Keuangan (SNLK) 2019 menyebutkan bahwa indeks inklusi keuangan mencapai 76,19 persen yang sebelumnya pada 2016 di angka 67,8 persen dan indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen yang sebelumnya 29,7 persen.

"Dengan capaian ini, BI bersama lembaga lain diminta untuk terus mendorong literasi keuangan dengan berbagai cara, tentunya sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat" tutup Bang Jun sapaan akrabnya.

"Dengan dilakukannya sosialisasi ini, harapannya literasi keuangan masyarakat terus meningkat dan bisa merasakan manfaatnya. Adapun salah satunya adalah efisiensi

**Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI



# Neraca Dagang Terpuruk, Pemerintah Jangan Sibuk Salahkan Eksternal.

Wacana pemerintah menyiapkan beberapa program di 2020 untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan perlu dipertanyakan, karena pada pertengahan 2019 juga pemerintah pernah mengungkapkan tengah menjalankan jurus-jurus atasi defisit, tapi hasilnya zero

## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (18/12) — Neraca dagang Indonesia tidak mampu bangkit dari keterpurukan. BPS mencatat, defisit neraca dagang mencapai US\$3.1 miliar pada periode Januari-November 2019. Selama periode tersebut ekspor mencapai US\$153,1 miliar; sedangkan impor mencapai US\$156,2 miliar. Baik ekspor maupun impor, masing-masing turun 7,6 persen (yoy) dan 9,88 persen (yoy).

Anggota DPR RI Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menjelaskan dampak lanjutan dari kegagalan mencetak surplus perdagangan terlihat dari beberapa hal seperti

tingginya defisit neraca transaksi berjalan hingga kerentanan terdepresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS.

"Defisit neraca transaksi berjalan mencapai US\$22,5 miliar sepanjang Januari-September 2019, ini naik dari US\$21,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Data-data tersebut mencerminkan bahwa pemerintah gagal memperbaiki kinerja neraca dagang sepanjang tahun 2019," kata Ecky di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Lebih lanjut Ecky menyatakan Rupiah menguat pada akhir-akhir ini, namun hal

itu bukan karena faktor fundamental seperti faktor perbaikan ekspor maupun investasi langsung.

"Tetapi, karena potensi resesi di Amerika Serikat. Jadi, capital inflow melonjak. Namun, dana panas ini akan kabur lagi kalau ada gejolak," ujar wakil ketua Fraksi PKS ini.

Menurut Ecky Wacana pemerintah menyiapkan beberapa program di 2020 untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan perlu dipertanyakan, karena pada pertengahan 2019 juga pemerintah pernah mengungkapkan tengah menjalankan jurus-jurus atasi defisit, tapi hasilnya zero

Anggota Legislatif dari Dapil Jabar III ini menuturkan Pemerintah tidak bisa terusterusan menyalahkan perang dagang AS-China sebagai 'biang keladi' penurunan kinerja neraca dagang.

"Ini kan bukan baru saja terjadi, sudah sejak dulu. Tetapi, pemerintah gagal mencari celah untuk menyasiatkan penurunan nilai ekspor Indonesia. Kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Harusnya pemerintah memaksa

agar impor turun lebih tinggi, agar surplus neraca dagang (bulan-an) bisa tercapai," pungkas Ecky.

Foto : dpr.go.id



# DPR: Ekonomi Kepri Tak Boleh Bergantung Pada Batam



Anggota Komisi XI DPR RI Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. (Keempat dari kanan) saat kunker Komisi XI DPR RI ke Batam, Riau.

Tanjung Pinang (19/12) — Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini jangam bergantung pada perekonomian wilayah Batam, sebagaimana disampaikan anggota DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati.

dalam kunjungan kerja komisi XI DPR RI jelang reses masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, Anis menururkan pengembangan ekonomi Kepri tak boleh bertumpu pada Batam.

“Pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus memiliki rancangan pembangunan wilayah, dengan

prioritas sektor yang harus dikembangkan. Bagaimana meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak bergantung dan bertumpu pada Batam”.

Anis menyoroti laporan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kepri yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan ke III tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 4,89% year on year (YOY). Angka ini didorong oleh pertumbuhan kategori industri pengolahan yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,72%.

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) capaian Provinsi Kepri ini berada di urutan ke 30 dari 34 Provinsi di Indonesia. Walaupun berdasarkan angka capaian pertumbuhan mengalami kenaikan, dari hanya 2% di tahun 2017 menjadi 4,89% di tahun 2019, namun data BPS tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dicapai pemerintah provinsi Kepri masih berada di level bawah.

Padaحال provinsi Kepri memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain, yang seharusnya menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Dipaparkan Anis, Selama ini Pemerintah Provinsi Kepri banyak bergantung dan bertumpu pada Batam.

Batam menjadi kebanggaan provinsi Kepri karena mengumbang 36% untuk pendapatan daerah (Pendapatan Domestik Bruto/PDB).

Batam juga menjadi kawasan berteknologi tinggi, yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, Batam sempat diprediksi dapat

“Pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus memiliki rancangan pembangunan wilayah, dengan prioritas sektor yang harus dikembangkan. Bagaimana meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak bergantung dan bertumpu pada Batam”

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.**

Anggota Komisi XI DPR RI

menyaingi industri di Singapura. Dengan segala harapan itu, Batam dijadikan kawasan Free Trade Zone (FTZ) dengan fasilitas fiskal yang istimewa, bebas biaya masuk, bebas pajak pertambahan nilai (PPN) import, bebas pajak penjualan barang mewah, bebas PPh 22 dan kemudahan lainnya.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi Batam akhir-akhir ini, tidak dalam keadaan baik. Data menyebutkan dalam waktu dekat, ada dua industri yang akan tutup dan tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sementara investasi baru yang masuk tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang terkena PHK, disisi

lain industri yang ada sedang melakukan pengurangan produksi”, ungkapny.

Data juga menunjukkan bahwa potensi PHK di sektor elektronik di Batam akan mendera sekitar 2000 tenaga kerja dalam waktu dekat. Ini tentu harus diantisipasi.

Anis kemudian membeberkan data lain yang menyebutkan bahwa cita-cita untuk menyaingi industri Singapura, sangat jauh dari harapan dengan menurunnnya pertumbuhan industri manufaktur di Batam.

Selengkapny kunjungi fraksi.pks.id



## Menerima Deputi TETO Indonesia

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA menerima Mr. Peter Lan, Deputi Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) Indonesia. di Kantor Fraksi PKS DPR RI Senayan Jakarta pada Selasa 17 Desember 2019.

Forikan berupaya menjadikan Ikan sebagai sumber protein menjadi makanan yang digemari semua kalangan. Salah satu upaya besarnya adalah termasuk makan massal 150 ribu salalauak yang hari ini dicatat MURI sebagai rekor Indonesia

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota DPR RI Dapil Sumbar

Jakarta (14/12) — Ketua Forikan (Forum Gemar Makan Ikan) Sumatera Barat yang juga Anggota DPR RI Nevi Zuairina mendapat sertifikat dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Nevi dinilai berhasil karena Forikan yang dipimpinnya menyematkan Rekor MURI untuk makan Salalauak (kuliner khas pariaman) sebanyak 150 ribu buah.

“Salalauak itu terbuat dari tepung dan pakai ikan digoreng lezat. Forikan berupaya menjadikan Ikan sebagai sumber protein menjadi makanan yang digemari semua

**Nevi Zuairina Peroleh Rekor MURI**

# Makan Salalauak 150 Ribu Buah Jadi Rekor Indonesia

kalangan. Salah satu upaya besarnya adalah termasuk makan massal 150 ribu salalauak yang hari ini dicatat MURI sebagai rekor Indonesia.” ujar Nevi usai menerima sertifikat MURI, Sabtu (14/12/2019) di Jakarta pada peringatan Hari Ikan Nasional.

Forikan yang diketuai istri Gubernur Sumbar dalam menggalakan Gemarikan (gerakan mari makan ikan) mampu memasifkan konsumsi ikan bagi masyarakat Sumbar sehingga menjadi pilihan utama. Rata-rata konsumsi ikan perkapita pertahun di Sumbar masih sebanyak 38 kg.

Sementara rata-rata konsumsi ikan perkapita pertahun secara nasional adalah 41 kg. Namun demikian, konsumsi ikan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masuk dalam 10 besar pengonsumsi ikan tertinggi di Indonesia.

“Kita giat melakukan pembinaan ke kabupaten dan

kota, termasuk membangun Forikan di tingkat kota dan kabupaten,” ujar Nevi.

Anggota DPR Komisi VI ini juga untuk me-masalkan makan ikan melalui Forikan Sumbar, melakukan berbagai perlombaan seperti mewujudkan implementasi Gemarikan pada kurikulum PAUD.

“Menggelar lomba inovasi masakan berbahan baku ikan, menggelar lomba jingle Gemarikan antar SMA atau sederajat. Sosialisasi ke PAUD dalam rangka implementasi Gemarikan pada kurikulum PAUD,” ujar Nevi.

Menurut Nevi, selain konsumsi ikan sebagai gudang protein, juga bisa mengantisipasi wabah stunting. Laut sebagai tambang ikan yang tak pernah habis selama manusia saling menjaga lingkungan yang ada. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2



Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Merupakan suatu Negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.

“Ikan juga tidak akan pernah habis karena laut Sumbar kaya ikan dan Insya Allah terjaga dari praktek ilegal fishing,” ujar Nevi.

Rekor MURI makan

Salalauak diperoleh Forikan Sumbar hari ini kata Nevi adalah tantangan untuk lebih banyak lagi berbuat baik untuk Sumbar.

“Rekor MURI selain bangga tentu jadi tantangan kedepan bagi Forikan untuk lebih masifnya masyarakat konsumsi ikan,” ujar Nevi

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# Selamat Hari **BELA NEGARA**

19 DESEMBER 2019



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Mari junjung tinggi  
persatuan dan kesatuan  
dalam kehidupan berbangsa  
dan bernegara



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



## PERINGATI HARI BELA NEGARA

# Sukamta: Semangat dan Optimis Membangun Bangsa

dalam momentum Bela Negara ini, kita harus tetap semangat dan optimis

**H. SUKAMTA, Ph.D**  
Anggota Komisi I DPR RI

Menurut Sukamta dalam kondisi negara yang mengkhawatirkan, terselip secercah harapan Indonesia akan maju.

"Di hari Bela Negara ini, kita perlu refleksi dan introspeksi, permasalahan bangsa sangat banyak dan serius, mulai dari angka kriminalitas, model kejahatan terus berkembang, narkoba, korupsi, separatisme, ancaman komunisme, terorisme, bencana alam, apatisme sebagian generasi muda hingga persoalan ekonomi. Tapi, dalam momentum Bela Negara ini, kita harus tetap semangat dan optimis", ungkap Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menambahkan bahwa hingga

tahun 2018, BPS mencatat crime rate masih berkisar 129 kasus kriminal per 100 ribu penduduk, atau 336.652 kasus kriminal yang ditangani kepolisian, angka yang tergolong tidak rendah.

Sementara kejahatan narkoba juga menunjukkan tren meningkat, tercatat 600-an kasus di 2015, 800-an kasus di tahun 2016, 2017 mencapai 900-an sampai 2018 di atas 1000 kasus, diprediksi tahun 2019 pun mengalami peningkatan.

"Kondisi perekonomian yang cenderung stagnan seperti sekarang ini, growth di kisaran 5% untuk sebuah negara berkembang itu cukup mengkhawatirkan. Sejatinya, negara berkembang sangat berpeluang untuk menggenjot growth nya di atas 5%", urainya.

Kita berharap adanya program bela negara memiliki dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Negara-negara dengan skor HDI tinggi biasanya juga memiliki program bela negara. Dengan dididik untuk disiplin, jujur dan tidak mudah menyerah, insyaallah kualitas manusia

Indonesia akan terus membaik.

"Mudah-mudahan dengan memiliki semangat bela negara yang tinggi, insyaallah HDI kita akan meningkat. Tahun 2019 ini saja, laporan UNDP, skor HDI Indonesia meningkat menjadi 0.707 termasuk kelompok HDI tinggi. Dan ini adalah modal besar dalam memajukan pembangunan sebuah bangsa, apalagi kita memiliki peluang bonus demografi pada tahun 2030", tegas Sukamta.

la melanjutkan, Lalu apa sih bela negara itu? Pada dasarnya bela negara ini memiliki cakupan yang luas. Kita berangkat kerja, berangkat sekolah-kuliah, berangkat berjualan, jika diniatkan selain untuk menghidupi keluarga juga untuk berbakti kepada ibu pertiwi secara sepenuh hati, maka pada hakikatnya kita sedang melaksanakan bela negara.

Dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) juga diatur cakupan dari program Pendidikan Kesadaran Bela Negara, yang mencakup di lingkungan masyarakat, profesi dan pendidikan. Meskipun

lebih khusus lagi bela negara juga dilakukan dengan membentuk Komponen Pendukung (Komduk) dan Komponen Cadangan (Komcad) yang berfungsi menopang Komponen Utama yaitu TNI jika ada mobilisasi dikarenakan situasi darurat militer atau bahkan perang.

"Global McKinsey Institute memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju peringkat ke-7 dengan perekonomian terbesar melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030. Pada tahun itu, Indonesia diprediksi akan memiliki sekitar 113 juta orang tenaga terampil dan ahli serta 135 juta kelas menengah. Ini semua akan mendrive Indonesia masuk kategori negara maju. Nah, dengan program bela negara tadi yang kita harapkan akan memiliki dampak positif terhadap HDI, mudah-mudahan

ini sejalan dengan prediksi McKinsey tadi. Yang penting kita harus selalu semangat dan optimis," harap Wakil Rakyat dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.





## PERINGATI HARI BELA NEGARA

# Tantangan Bangsa Semakin Berat, Semangat Bela Negara Harus Semakin Kuat

Bela negara itu tanggung jawab kita sebagai rakyat dan warga negara, jadi bukan hanya domain militer atau angkatan bersenjata. Justru rakyat menjadi komponen penting dan strategis dalam bela negara

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (19/12) - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengajak segenap komponen bangsa menanamkan semangat bela negara dalam setiap laku kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat tantangan bangsa ke depan semakin berat.

Sebagaimana Mr. Syafrudin

Prawiranegara dalam kondisi genting atas perintah Soekarno-Hatta mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada 19 Desember 1948. Peristiwa sejarah itu kemudian diperingati sebagai Hari Bela Negara.

"Bela negara itu tanggung jawab kita sebagai rakyat dan warga negara, jadi bukan hanya domain militer atau angkatan bersenjata. Justru rakyat menjadi komponen penting dan strategis dalam bela negara. Caranya dalam setiap sikap dan perbuatan selalu menimbang kepentingan, keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa," ungkap Jazuli.

Setiap perbuatan kita, baik tutur kata, sikap maupun tingkah laku di berbagai ruang dan media harus mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan, semangat toleransi dan kebhinnekaan, semangat saling menghargai dan gotong royong. Bukan sebaliknya, sikap perbuatan yang menyakiti, mengadu domba, memecah belah, menista, menimbulkan konflik dan lain sebagainya.

"Negara ini dibangun dan dipertahankan susah payah oleh para pejuang seperti Mr. Syafrudin Prawiranegara saat kondisi terjepit membentuk PDRI untuk melawan opini penjajah Belanda bahwa pemerintah Indonesia telah bubar. Langkah itu mengantarkan kemenangan kita dalam perundingan yang membuat penjajah hengkang kaki dari Indonesia," kata Jazuli.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKS ini berpesan jangan lah kita menjadi bagian yang meruntuhkan Indonesia dengan sikap perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kita kokohkan Pancasila sebagai dasar dan nilai utama dalam bela negara. Dengan Pancasila kita hadapi segala bentuk ancaman terhadap NKRI baik yang potensial maupun yang sudah aktual.

"Jadi intinya kita bisa melakukan bela negara dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara baik dan konsekuen," pungkas Jazuli.

### Tantangan Semakin Berat

Anggota DPR dapil Banten ini mengatakan bahwa tantangan kebangsaan ke depan semakin berat. Ancaman terhadap negara dimensinya semakin luas, tidak hanya yang nampak/kasat mata tetapi banyak yang tidak nampak seperti pergeseran nilai, budaya, pelemahan karakter dan sejenisnya serta semakin abainya kita terhadap apa yang benar-benar menjadi kepentingan (national interest) bangsa dan negara.

"Semangat dan kesadaran bela negara harus semakin kuat kita tanamkan kepada generasi bangsa. Ini semua soal penanaman nilai yang harus didesain melalui sistem pendidikan dan pelatihan termasuk, antara lain, dengan menyegarkan kembali mat

eri Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)," pungkas Jazuli.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# *Terima Kasih Ibu*

*Terima Kasih Ibu  
kau bukan hanya lahirkan  
putra dan putri, namun engkau  
berjuang wariskan  
generasi*

*Selamat  
Hari Ibu  
22 Des 2019*



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



*Terima Kasih Ibu*

## PERINGATAN HARI IBU NASIONAL

# Mufida: Angka Kematian Ibu dan Perceraian Pekerja Migran Memprihatinkan

Penyadaran sejak dini perlu dilakukan secara menyeluruh. Untuk pemahaman di kota-kota mungkin sudah cukup bagus. Tetapi di desa-desa masih cukup memprihatinkan. Penyebab kematian ibu ini kan banyak variasinya, ada karena hipertensi, perencanaan kelahiran yang kurang baik misal di usia rawan atau di usia yang terlalu dini dan lain-lain

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (22/12) — Para ibu Indonesia yang diharapkan menjadi pendidik anak-anak bangsa, masih menghadapi problem besar. Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia masih tinggi dibanding negara-negara ASEAN. Sementara para ibu yang menjadi pekerja migran, menghadapi ancaman meningkatnya angka perceraian setiap tahun terus.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayanti dalam siaran persnya, Minggu

(22/12/2019), Mufida menyampaikan keprihatinannya karena Angka Kematian Ibu saat melahirkan di Indonesia nomor 2 tertinggi di ASEAN.

“Kita masih memprihatinkan, di level ASEAN saja rata-rata AKI 197 per 100 ribu kelahiran. Sedangkan di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup, tidak lebih baik dari Filipina. Bahkan menempati posisi kedua dengan AKI tertinggi,” papar Mufida.

Menurut Mufida, penyadaran sejak dini perlu

dilakukan secara menyeluruh. Untuk pemahaman, lanjut Mufida, di kota-kota mungkin sudah cukup bagus.

“Tetapi di desa-desa masih cukup memprihatinkan. Penyebab kematian ibu ini kan banyak variasinya, ada karena hipertensi, perencanaan kelahiran yang kurang baik misal di usia rawan atau di usia yang terlalu dini dan lain-lain,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sementara itu, para ibu yang menjadi pekerja migran juga menghadapi ancaman yang tak kalah berat. Dipaparkan Mufida, berdasarkan dokumen dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong yang disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian Pencataan Perkawinan WNI di Luar Negeri, pengajuan gugat cerai pada 2014 tercatat 2971 kasus. Meningkat menjadi 3280 kasus di tahun 2015. Meningkat lagi pada 2016 menjadi 3579 kasus.

“Setiap tahun, ada peningkatan 300an kasus perceraian menimpa perempuan pekerja migran.

Pada tahun 2019 diperkirakan ada sekitar 4600 kasus,” ungkap Mufida.

Mufida menambahkan, banyak perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbani dengan banyak masalah keluarga sebelum memutuskan menjadi PMI. Perempuan PMI banyak yang tidak siap secara skill yang menjadi tuntutan pekerjaan dan juga dari sisi bahasa.

“Sementara kepercayaan diri mereka juga rendah, sehingga cenderung tidak percaya diri jika ada yg mengintimidasi dan tidak mau repot memperpanjang dengan urusan hukum atau melapor ke kepolisian setempat, padahal pada posisi yang benar,” papar Mufida.

Problem makin berat karena banyak dari perempuan PMI hadir di negara penempatan dengan sejuta rindu kepada anak, orangtua, suami, teman temannya. Akibatnya, cenderung prestasi kerjanya kurang.

Mufida menambahkan, sementara di

tanah air, dengan para ibu pergi bekerja di LN juga menjadi beban bagi anaknya karena peran pendidikan yang seharusnya dijalankan para ibu menjadi tidak dapat berjalan.”

“Belum lagi dengan angka perceraian yang sangat tinggi, berakibat ketidakjelasan hak asuh dan anak lagi-lagi menjadi korban,” tandas Mufida.



Jakarta (22/12) — Tanggal 22 Desember 2019 hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Ibu Nasional, menjadi perhatian khusus bagi Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati.

Anis mengajak semua masyarakat untuk benar-benar merenungkan jasa dan peran para Ibu, dalam kehidupan setiap insan.

"Peran ibu sebagai pendidik pertama anak bangsa sangat penting. Jauh sebelum adanya institusi pendidikan seperti PAUD, para ibu sudah memulai pendidikan anak-anak mereka," ungkap Anggota Dewan Asal Jakarta ini.

Anis melanjutkan betapa banyaknya peran ibu mulai dari menyanyikan lagu-lagu kanak-kanak klasik yang sarat dengan pesan-pesan kebajikan dan membacakan cerita atau dongeng sebelum tidur.

"Kebiasaan sederhana yang sejatinya menyemai benih-benih pendidikan moral dan literasi yang kelak di kemudian hari akan sangat bernilai sebagai bekal soft skill dan sikap manusia unggul," papar wanita berkecamata ini.

Menurut Anis dalam ajaran Islam, prinsip "ibda bi nafsik" atau memulai dari diri sendiri adalah konsep keteladanan yang penting dalam kehidupan seorang muslim, khususnya seorang ibu atau orang tua.

"Menampilkan diri sebagai teladan bukan perkara mudah, namun manfaatnya sangat berharga. Kesesuaian antara kata dan perbuatan adalah bentuk paling transparan dalam pembuktian komitmen dan integritas. Jadi, melalui keteladanan seorang ibu, anak

## BERITA FRAKSI

Fraksi.pks.id | Ahad 22 Desember 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.



## PERINGATAN HARI IBU NASIONAL

# PKS: Hormati Peran Ibu Mendidik Generasi Bangsa

tidak hanya belajar dan meniru sisi kelembutan, kesabaran dan perilaku kesantunan semata, tetapi juga mewarisi sikap-sikap luhur yang teguh dalam menghadapi arus kehidupan yang kadang kala tidak selalu sesuai", pungkasnya.

Di sisi yang lain, lanjut Anis, peran ibu tidak terlepas menjadi bagian dari kiprah perempuan dalam ranah sosial yang lebih luas. Hari Ibu terlahir dari Kongres Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928. Kontribusi perempuan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sangat penting. Ibu dan perempuan Indonesia bahu membahu dengan kaum laki-laki berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.

Tak hanya itu, Anis mengatakan beragam profesi dan posisi yang ada di sektor ekonomi juga tidak luput dari sentuhan para Ibu, mereka aktif berwirausaha dan menjabat posisi-posisi penting di bidang usaha dan pemerintahan. Ketua

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengatakan, pada 2015 jumlah pengusaha perempuan sebanyak 60 persen dari 49,9 juta pengusaha di Indonesia. Tiap tahunnya tumbuh 20 persen.

"Pertumbuhan yang antara lain disebabkan kondisi perekonomian yang menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga", paparnya.

Demikian juga di bidang politik, kata Anis, tidak kurang dari 97 orang atau 17,32 persen perempuan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia perempuan periode 2014-2019. Peran para anggota dewan perempuan dirasa penting untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat perempuan di ranah sosial, politik, hukum, kenegaraan, dan kesejahteraan perempuan secara umum.

"Masih banyak lagi bidang

sosial kemasyarakatan dan kenegaraan yang selama ini juga sudah menjadi tempat berkiprah para Ibu. Masih banyak yang dapat dilakukan dan masih besarnya harapan agar para Ibu lebih banyak berperan", ungkap Anis.

Menurut Anis, harapan meningkatkan kesejahteraan para Ibu dan membahagiakan mereka juga perlu diwujudkan segera, agar mereka dapat berkontribusi lebih banyak untuk Indonesia dan bahkan untuk dunia. Sumbangsih kita sebagai anak dan elemen bangsa dalam mewujudkan

*Terima Kasih Ibu*

kesejahteraan dan kebahagiaan para Ibu dapat dimulai sejak hari ini dari diri kita masing-masing, hingga kemudian mendorong dan mengajak seluruh elemen bangsa yang lain.

"Izinkan kami hari ini bersyukur dan merayakan Hari Ibu untuk Ibu terbaik yang Allah haddiahkan kepada kami. Dua kami untuk kemuliaan para Ibu di hadapan Sang Maha Pencipta dan permohonan agar kami semua diberi kesempatan untuk membahagiakan Ibu," tutup Anis.

Peran ibu sebagai pendidik pertama anak bangsa sangat penting. Jauh sebelum adanya institusi pendidikan seperti PAUD, para ibu sudah memulai pendidikan anak-anak mereka

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI



## BERITA FOTO



## Kunjungan ke DPW PKS Jawa Timur

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Adang Darajatun dan Dimiyati Natakusumah melakukan kunjungan dalam rangka Reses ke DPW PKS Jawa Timur pada Jum'at 20 Desember 2019. Beberapa kader dan Pengurus PKS hadir pada acara ini.

## PROFIL

## Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.



**D**r. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Lahir 50 tahun lalu di Ibukota Jakarta dari Ibu sholihah bernama Rohati dan Bapak yang tegas Ali Sera yang Asli orang Betawi. Bang Mardani (panggilan akrab) mewakili masyarakat Jakarta Timur (DKI Jakarta I) jadi Anggota Legislatif Fraksi PKS DPR RI 2019 - 2024.

Bang Mardani Tahan uji, meski banyak yang Bully. Tahan diri, meski banyak yang muji. Bismillah aja beliau sering ungkapan, #Kamiposisi. Takbir!

Bang Mardani punya 9 anak dan 5 cucu dari satu istri bernama Siti Oniah Binti Warid.

Hidup rukun, makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, kerta raharja . Alhamdulillah.

Selain seorang politisi, Bang Mardani juga sebenarnya dan awalnya adalah akademisi alias dosen. Sekolahnya aja "Gak" tanggung-tanggung ambil mesin dari S1 Teknik Mesin Universitas Indonesia, lanjut Master of Engineering dan rebut Philosophiae Doctorate di Universiti Teknologi Malaya, Malaysia. Bisa paham kan, kenapa bang Mardani berani kaya Anak STM

PKS adalah keluarga baginya, didukung dengan pengorbanan istri yang luar biasa. Terbukti dan Teruji, Bang

Mardani pernah bilang pas pengen liburan keliling Eropa enggak jadi karena dipanggil tugas Partai, Lagi main sama cucu 'eh' di panggil untuk tugas Partai dan banyak deh. Namun itu enggak bikin 'kendor' semangat keluarga, mereka dah paham ini bukan sekedar aktivitas biasa; ada dakwah dan cinta kepada Indonesia. Mereka saling mengisi dan mencintai satu sama lain. Kita doakan semua kebaikan tercurah dan semua jejelekan enggan mampir. Amin.

Hari-hari kelelahan saat ini, kemarin, atau esok bagi Bang Mardani sarana mencapai ridho Allah SWT, didalamnya tersembul doa dan cinta agar mampu membawa keluarganya hingga ke surga-Nya.

Pesan untuk keluarga Indonesia: "Harta yang paling berharga adalah iman. Dan menanam Iman yang paling utama di keluarga"

"Nyang" mau kenalan lebih dekat dan "mantengin" aktivitas Bang Mardani bisa follow akun sosial medianya:

**Twitter :**  
@MardaniAliSera

**Instagram**  
@mardanialisera

**Website**  
mardanialisera.id



”  
Harta yang paling berharga adalah iman. Dan menanam Iman yang paling utama di keluarga”



Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

**KANAL RESMI  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI